

Judul : Komite pembangunan Papua, fokus utama bangun SDM
Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komite Pembangunan Papua Fokus Utama Bangun SDM

FOTO: DOC IPRI/BAI



Indrajaya

ANGGOTA Komisi II DPR Indrajaya mengapresiasi pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Komite ini akan menjadi wadah koordinasi dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada rakyat serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua. "Komite ini dapat menjadi jembatan koordinasi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan enam provinsi di Tanah Papua," ujar Indrajaya dalam keterangannya, Minggu (12/10/2025).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik ketua dan sembilan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Indrajaya memastikan agar seluruh program pembangunan berjalan secara sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Indrajaya berharap komite ini dapat mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita kontekstual Papua. Seperti pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Fokus utama harus diberikan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena dua hal ini merupakan

fondasi utama kemajuan daerah.

Dia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat langkah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Tanah Papua. Penguatan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pesisir, juga perlu menjadi perhatian serius agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Papua, lanjutnya, memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Posisi strategis Papua sebagai wilayah maritim yang kaya sumber daya harus dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Indrajaya optimistis, kehadiran komite ini akan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Papua dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan komitmen Pempus dan Pemda, Papua akan semakin maju dan sejahtera.

Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pembentukan komite ini akan menjadi motor baru percepatan pembangunan di Tanah Papua. Tugasnya, mengoordinasikan percepatan pembangunan di enam provinsi Papua antara kementerian/lembaga dan Pemda.

"Semua program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Papua wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Komite ini," kata Ribka di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Sebagai pejabat yang melapor langsung ke Presiden, Ribka menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua. "Ini amanah besar untuk memastikan semua program berpihak pada rakyat Papua agar maju dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045," ujar Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua ini. ■ TIF